

IMPLEMENTASI PROGRAM PANJALU JAYATI CORPORATE UNIVERSITY (PANJI CORPU) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Laily Muamanah¹, Indah Prabawati²

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya

Correspondence		
Email: laily.20092@mhs.unesa.ac.id , indahprabawati@unesa.ac.id	No. Telp:	
Published 28 April 2025	Published 1 Mei 2025	Published 2 Mei 2025

ABSTRAK

Tingkat Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Kediri pada tahun 2020 yang tergolong rendah yakni sebesar 52,11% mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri meluncurkan Program Panjalu Jayati Corporate University (Panji Corpu). Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalitas ASN. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti jaringan internet yang kurang stabil dan sistem informasi yang belum optimal. Sehingga, tujuan penelitian ini yakni mengetahui implementasi dari program Panji Corpu di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Panji Corpu telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Kediri. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat utama, seperti kejelasan komunikasi dan keterbatasan sarana prasarana. Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, yaitu integrasi sistem informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penyusunan jadwal pelatihan yang terorganisir untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata kunci: Panji Corpu, implementasi kebijakan publik, pengembangan SDM

ABSTRACT

The Professionalism Index level of the State Civil Apparatus (ASN) of the Regional Personnel Agency in Kediri District in 2020, which was classified as low at 52.11%, prompted the Kediri District Government to launch the Panjalu Jayati Corporate University (Panji Corpu) Programme. This programme is regulated in Kediri Regent Regulation Number 66 of 2021 which aims to improve the competence and professionalism of ASN. However, the implementation of this programme still faces various obstacles, such as unstable internet networks and information systems that are not yet optimal. Thus, the purpose of this research is to find out the implementation of the Panji Corpu programme at the Regional Staffing Agency of Kediri Regency. This research uses the theory of policy implementation according to George Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analysed using the interactive analysis method according to Miles and Huberman, which includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Panji Corpu Programme has been well implemented and has a positive impact on ASN competency development in Kediri District. However, there are some major inhibiting factors, such as communication clarity and limited infrastructure. Based on these findings, the researcher recommends several improvement measures, namely the integration of information systems, the implementation of regular monitoring and evaluation, and the preparation of an organised training schedule to support the sustainability of the program.

Keywords: Panji Corpu, public policy implementation, human resource development

PENDAHULUAN

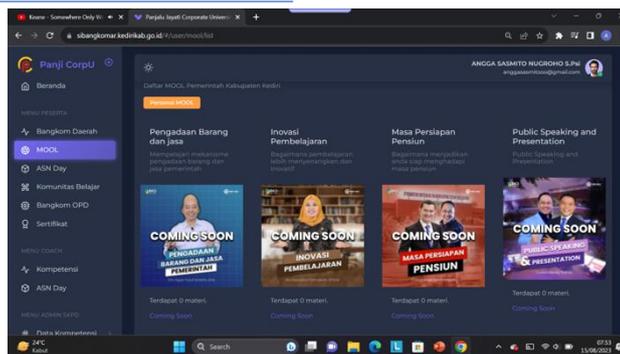
Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan krusial sebagai pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung proses pembangunan nasional. Peran aktif ASN sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan, sehingga keberadaan ASN menjadi faktor yang tak terpisahkan dalam menjamin kelancaran kedua aspek tersebut (Solehudin, 2023). Maka dari itu, perlu adanya

ASN yang professional dan berkualitas dalam menjunjung birokrasi yang dapat memberi dampak lebih baik ke masyarakat. Diketahui bahwa kenyataannya indeks kualitas atau profesionalitas ASN di Indonesia tergolong rendah, hal ini dinyatakan secara terbuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Abdullah Azwar Annas menyatakan “Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia” pada siaran pers di laman resmi Kemenpan RB (BKN, 2022). Untuk meningkatkan kualitas ASN maka pemerintah perlu untuk melakukan manajemen ASN dengan mengembangkan talenta dan karir ASN serta mengembangkan kompetensi ASN, seperti yang terbilang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN. Dalam menggambarkan kualitas ASN, terdapat empat instrumen penting yang digunakan, antara lain berdasarkan keselarasan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dalam kerangka ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan memiliki Indeks Profesionalitas (IP) yang memadai untuk setiap pegawainya. Indeks Profesionalitas ini akan menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas kinerja ASN.

IP ASN dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yakni Badan Kepegawaian Daerah yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten. Seperti halnya dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil evaluasi BKN pada tahun 2021, ditemukan bahwa Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kediri dalam kategori sangat rendah, yakni berada pada angka 52,11 (Tunsiah & Soantahon, 2021). Maka dari itu BKD Kabupaten Kediri membentuk Corporate University dalam proses pelatihan kompetensi pegawai nya yang dinamakan Panjalu Jayati Corporate University (PANJI CORPU), dimana *Corporate University* ini memiliki konsep masif dan *low budget*.

Program *Panjalu Jayati Corporate University* memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN melalui upaya peningkatan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai ASN di wilayah Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/79/418.08/2022 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan *Panjalu Jayati Corporate University*. Dalam keputusan tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dan mekanisme *Panjalu Jayati Panji CorpU* meliputi ASN Day; *Massive Open Online Learning* (MOOL); Komunitas Belajar; Pelaksanaan On the Job Training, Workshop, Benchmarking, Magang dan Detasering; Pengembangan Kompetensi Terstruktur oleh Perangkat Daerah Kediklatan; dan Pengembangan Kompetensi Bidang Tugas oleh Perangkat Daerah lainnya.

Pada pra penelitian yang peneliti lakukan pada BKD Kabupaten Kediri, peneliti mengetahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasian kegiatan-kegiatan Panji CorpU di Kabupaten Kediri, diantaranya jaringan internet yang kurang stabil pada saat pelaksanaan webinar, sumber daya manusia atau fasilitator yang terbatas, keterbatasan anggaran, dan sistem informasi Sibangkomar yang belum sempurna yakni masih dalam perbaikan sehingga tingkat pemanfaatan e-learning belum maksimal yang mana menghambat pengimplementasian kegiatan-kegiatan Panji CorpU, seperti ASN Day dan *Massive Open Online Learning* (MOOL).



Gambar 1. Aplikasi Sisbangkomar (Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur)
Sumber : Dokumentasi Penulis (2023)

Dalam menghadapi tantangan ini, Panji CorpU perlu melakukan investasi lebih lanjut dalam pelatihan SDM, perbaikan sarana prasarana, serta pengembangan aplikasi yang mendukung integrasi data kegiatan, agar perubahan menuju blended learning dapat berhasil dan memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi dan pegawainya.

Berdasarkan latar belakang diatas banyak ditemukan masalah dalam penerapan Program Panji CorpU di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai **“Implementasi Program Panjalu Jayati Corporate University (Panji CorpU) di Kabupaten Kediri”**. Rumusan masalah peneliti, yaitu Bagaimana Implementasi Program Panji CorpU Dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Kabupaten Kediri?.

Menurut Tachjan (Tachjan, 2006), Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas administratif yang dimulai setelah kebijakan tersebut disahkan, dengan tujuan membangun hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut sebagai hasil dari tindakan pemerintah. Tachjan (Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat komponen penting yang harus dipenuhi, yaitu keberadaan pelaksana kebijakan, program yang akan dijalankan, serta kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran. Suatu kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif apabila diwujudkan secara langsung melalui program atau dalam bentuk implementasi konkret dari kebijakan yang telah dirumuskan (Utami et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan model implementasi dari George C. Edward III dalam (Mulyadi, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Keempat elemen ini saling berkaitan dan memerlukan pengelolaan yang sinergis dan intensif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal. Dimana, model mengandaikan implementasi berjalan secara linier dari kebijakan publik. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa variable tersebut, diantaranya :

1. Komunikasi

Salah satu faktor krusial dalam keberhasilan implementasi program adalah efektivitas komunikasi yang dilakukan. Komunikasi adalah aktivitas mentransfer informasi dari satu individu atau kelompok ke pihak lain dengan memanfaatkan berbagai saluran atau media, sehingga penerima pesan dapat memahami informasi yang disampaikan (Sanjaya & Pratiwi, 2023). Mengacu pada pandangan George C. Edward III dalam (Widodo, 2010), terdapat tiga hal utama yang menjadi kunci agar komunikasi berjalan efektif dalam implementasi program: (1)Kejelasan pesan yang disampaikan, (2)Konsistensi dalam penyampaian informasi, dan (3)Jangkauan komunikasi yang mampu menysasar kelompok sasaran secara tepat.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan kebijakan, sebab keterbatasan dalam hal ini akan menghambat efektivitas implementasi. Jenis sumber daya bisa berupa tenaga manusia maupun sarana dan prasarana non-manusia. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, antara lain staf yang dibutuhkan, informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, kewenangan implementor yang menjamin program dapat diarahkan sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditentukan, dimana perlu adanya manajemen ASN karena dapat memengaruhi dalam menjalankan tugas pelayanan public (Setyawan & Prabawati, 2021), sumber daya finansial dan fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia dalam mendukung proses implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi mencerminkan sikap dan nilai-nilai pribadi implementor, termasuk integritas, dedikasi, serta keterbukaan dalam menjalankan kebijakan. Ketika implementor memiliki disposisi positif, maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai harapan perumus kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi berperan penting dalam menjalankan kebijakan, karena dapat memberikan pengaruh besar terhadap proses implementasinya. Salah satu elemen penting dalam struktur tersebut adalah keberadaan prosedur operasional standar (SOP), yang menjadi panduan bagi pelaksana dalam menjalankan tugas. Namun, struktur yang terlalu hierarkis dan panjang dapat menghambat efektivitas pengawasan serta menimbulkan birokrasi yang berbelit atau *red-tape*.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendikripsikan tentang Implementasi Program Panjalu Jayati Corporate University di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten, khususnya di bidang pengembangan kompetensi dalam menjalankan Program Panjalu Jayati Corporate University (Panji Corpu).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri dilakukan dengan memanfaatkan teknik-teknik alami untuk memahami fenomena secara mendalam (Sugiyono, 2013). Lokasi penelitian bertempat di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, Jl. Soekarno Hatta, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182, Indonesia, yang dimana dinas tersebut termasuk dalam penerapan Program Panji Corpu.

Subjek penelitian ini adalah para pegawai di Bidang Pengembangan Kompetensi ASN di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Adapun yang menjadi kunci informasi pada penelitian ini, antara lain Priyo Adi Nugroho, S.I.P selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi; Setyo Puji Waluyo, S.E., M.M selaku Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda; Angga Sasmito Nugroho, S. Psi selaku Pengelola Penyelenggaraan Diklat; dan ASN Partisipan Program Panjalu Jayati Corporate University Kabupaten Kediri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis yang digunakan yakni mengadopsi model Miles, Huberman dan Saldana (Miles et al., 2014) yang melibatkan analisis interaktif dengan beberapa elemen analisis data, diantaranya Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian Data (*data display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusions drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri memiliki tugas untuk mendukung Bupati mengimplementasikan fungsi untuk menunjang bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri memiliki alamat di Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Adapun alamat website yang dapat diakses, yakni pada laman <https://bkd.kedirikab.go.id/>.



Gambar 2. Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri

Sumber : Dokumentasi Penulis (2024)

Struktur organisasi adalah susunan sistematis yang mencakup pembagian tugas, skema kerja, dan jenjang hierarki dalam suatu institusi yang ada pada suatu organisasi. Tatanan tersebut penting bagi organisasi untuk menjalankan tugas-tugasnya supaya lebih teratur dan terarah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri memiliki struktur organisasi untuk membagi tugas-tugas setiap bagian. Untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, dibentuklah struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Struktur organisasi di atas memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan, salah satu bidang yang bersangkutan dengan Panjalu Jayati Corporate University adalah Bidang Pengembangan Kompetensi.

Bidang Pengembangan Kompetensi bertanggung jawab atas penyusunan program serta evaluasi kegiatan dalam pengembangan kapasitas, baik dari aspek manajerial, fungsional, teknis, maupun sosiokultural. Dalam pelaksanaannya, Kepala Bidang menjalankan sejumlah fungsi, meliputi perumusan kebijakan pengembangan di berbagai bidang kompetensi, perencanaan kebutuhan pelatihan, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi, fasilitasi pelaksanaan pelatihan fungsional, serta evaluasi dan pelaporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Implementasi Program Panji Corpu (Panjalu Jayati Corporate University) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri

Implementasi Program Panjalu Jayati Corporate University (Panji CorpU) jika dilihat berdasarkan pendapat Tachjan dalam Mulyadi (Mulyadi, 2018), memiliki beberapa unsur implementasi sebagai strategi pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi, dimana merupakan beberapa unsur mutlak yang harus ada dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

Pertama, pelaksana dari pengembangan kompetensi ASN melalui Panji CorpU adalah Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya melalui tim kerja Panji CorpU yang terdiri dari tenaga honorer dan personalia ASN di Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2021 serta Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/79/418.08/2022.

Kedua, unsur implementasi menurut Tachjan dalam Mulyadi (Mulyadi, 2018) adalah adanya program yang dilaksanakan. Dalam hal ini, Program Panji CorpU menurut Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/79/418.08/2022 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Panji CorpU mencakup berbagai aktivitas pengembangan kompetensi ASN, seperti *Massive Open Online Learning* (MOOL), ASN Day, komunitas belajar, *On the Job Training*, magang, *benchmarking*, workshop dan detasering, serta diklat. Keseluruhan aktivitas ini dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Kediri.

Ketiga, unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah implementasi program kerja adalah adanya kelompok sasaran. Kelompok sasaran dari implementasi Panji CorpU adalah seluruh ASN di Kabupaten Kediri. Dengan adanya pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, ASN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas profesional mereka guna mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Lebih lanjut, dalam menganalisis Implementasi Program Panjalu Jayati Corporate University (Panji CorpU) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, peneliti menggunakan teori milik George C. Edward III sebagaimana dikutip dalam Mulyadi (2018:28-29). Dimana dianalisis berdasarkan empat variabel yang memiliki peran krusial dalam mencapai keberhasilan implementasi oleh George C. Edward III dalam Mulyadi (2018:28-29) antara lain :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas mentransfer informasi dari satu individu atau kelompok ke pihak lain dengan memanfaatkan berbagai saluran atau media, sehingga penerima pesan dapat memahami informasi yang disampaikan (Sanjaya & Pratiwi, 2023). Dalam konteks implementasi Program Panji CorpU di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, upaya komunikasi kepada kelompok sasaran menjadi langkah strategis untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal. Beberapa langkah komunikasi yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mempromosikan Program Panji CorpU antara lain adalah melalui sosialisasi langsung kepada ASN, penyebaran informasi melalui media sosial resmi pemerintah, penyelenggaraan seminar, dan melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian tiap-tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi ASN dalam berbagai kegiatan yang ditawarkan oleh Panji CorpU. Mengacu pada pandangan George C. Edward III dalam Widodo (2010:97), terdapat tiga hal utama yang menjadi kunci agar komunikasi berjalan efektif dalam implementasi program, antara lain :

a. Transmisi

Transmisi adalah proses penyebaran informasi terkait program kepada berbagai pihak yang terlibat, seperti pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan beberapa pihak lain yang berkepentingan. Pada konteks Implementasi Program Panji CorpU di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, transmisi dilakukan untuk mendistribusikan informasi kepada kelompok sasaran, yaitu ASN di Kabupaten Kediri; serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Panji CorpU menggunakan berbagai metode komunikasi yang efektif untuk menjangkau perangkat daerah di luar BKD, seperti media sosial, kanal YouTube, Instagram, grup WhatsApp, dan surat edaran. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi ini, BKD

dapat menjangkau lebih banyak peserta dan meningkatkan partisipasi dalam program-program yang diadakan.



Gambar 3. Dokumentasi Pamflet Panjalu Jayati Corporate University

Sumber : Instagram BKD Kabupaten Kediri

Seperti yang tertera dalam *feed* Instagram Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Kediri tersebut, bahwa penyebaran informasi terkait program kepada kelompok sasaran yakni seluruh ASN Kabupaten Kediri, dimana dalam pamflet tersebut sudah tertera tema yang akan dilaksanakan, informasi mengenai narasumber, serta waktu pelaksanaan program, sehingga kelompok sasaran dapat menerima informasi secara menyeluruh

b. Kejelasan

Informasi mengenai implementasi Program Panji CorpU harus disampaikan secara jelas kepada berbagai pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut meliputi pelaksana program, yaitu Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah; kelompok sasaran, yaitu ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Kejelasan informasi ini bertujuan agar seluruh pihak dapat memahami maksud, tujuan, sasaran, dan substansi dari program Panji CorpU. Selain itu, pada dimensi ini diperlukan adanya persiapan matang, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, untuk memastikan keberhasilan program yang berjalan secara efektif dan efisien..

Kemudahan dan kejelasan program ini turut dijelaskan oleh Ira Puspitasari selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Pare, dimana karena program ini dilaksanakan secara daring, akses bagi para peserta menjadi jauh lebih mudah. Materi yang disampaikan dalam webinar atau pelatihan dapat didengar dengan lebih jelas, dan peserta juga mendapatkan soft file materi sebagai panduan tambahan dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Namun, penerapan kebijakan yang dilakukan secara online memiliki tantangan tersendiri. Yakni pelaksanaan kebijakan tersebut bertepatan dengan jam kerja, yang menyebabkan peserta kesulitan untuk membagi waktu, yakni bekerja dan juga melaksanakan pelatihan.

Meski demikian, program yang dilaksanakan secara daring ini memberikan kemudahan signifikan bagi peserta, terutama mereka yang berada di wilayah luar, karena mereka tidak perlu datang langsung ke BKD atau Balai Pengembangan Kompetensi ASN Pemkab Kediri untuk mengikuti seminar, webinar, atau podcast. Semua kegiatan dapat diakses secara praktis dari lokasi masing-masing, yang menghemat waktu dan tenaga.

c. Konsistensi

Implementasi Program Panji CorpU berjalan dengan konsisten dan cukup optimal. Sejak diluncurkan, program ini aktif melaksanakan kegiatan, terutama webinar yang diadakan hampir setiap minggu. Meskipun akses penggunaan terhadap aplikasi Sisbangkomar kini berkurang karena sistem yang sempat maintenance, program ini tetap melanjutkan usaha untuk memperkenalkan dan mengembangkan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Selanjutnya Pak Angga Sasmito Nugroho, S.Psi pun turut menjelaskan bahwa program podcast di BKD Kabupaten Kediri sudah berjalan sejak tahun lalu, meskipun belum memiliki jadwal yang benar-benar rutin. Tahun ini, podcast telah dilakukan sebanyak delapan kali. Meskipun biasanya diadakan setiap bulan atau dua kali dalam sebulan, jadwalnya tidak selalu tetap, dan hari pelaksanaannya bervariasi. Untuk ke depannya, ada upaya untuk menjadwalkan podcast secara lebih teratur dengan frekuensi dua minggu sekali. Pak Angga Sasmito Nugroho, S.Psi juga menjelaskan bahwa meskipun aplikasi Sisbangkomar telah mendukung beberapa kegiatan penting seperti ASN Day dan MOOL, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama karena ketergantungan pada programmer yang sakit dan masalah teknis seperti kesulitan akses ketika digunakan oleh banyak peserta sekaligus. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga konsistensi operasional aplikasi tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program Panji CorpU, keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun finansial, yang mendukung kebijakan dan program secara efektif. Sumber daya yang dibutuhkan terhadap Implementasi Program Panji CorpU, antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam implementasi Program Panji CorpU di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri menunjukkan sikap yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap kritik serta saran. Mereka aktif dalam melaksanakan kegiatan, seperti webinar dengan tema yang selalu baru dan menarik. Selain itu, mereka terbuka terhadap masukan, yang dibuktikan dengan adanya kuisisioner evaluasi setelah setiap webinar untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan

Disisi lain, Team Panji CorpU mengalami tantangan tersendiri yaitu kurangnya personel atau pegawai dalam menjalankan program Panji CorpU, seperti yang dijelaskan oleh Angga Sasmito Nugroho, S.Psi bahwa pegawai BKD Kabupaten Kediri, khususnya di bidang pengembangan kompetensi ini masih kurang dan sering terjadi rangkap jobdesk, sehingga menyebabkan beban kerja masing-masing pegawai menjadi bertambah.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial adalah satu diantara aspek krusial dalam Implementasi Program Panji CorpU. Anggaran menjadi modal utama untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan webinar, penyediaan materi pelatihan, sertifikasi, hingga pengelolaan operasional program. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan program berpotensi menghadapi hambatan, baik terkait mutu pelaksanaannya maupun keberlangsungan aktivitas yang dijalankan.

Sumber daya finansial pelaksanaan Program Panji CorpU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan khusus untuk BKD. Lebih spesifik, program ini dibiayai melalui pos anggaran pengembangan kompetensi teknis. Meskipun tidak ada anggaran khusus yang secara spesifik hanya diperuntukkan bagi Panji CorpU, program ini menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan yang dikelola dalam kerangka pengembangan kompetensi teknis tersebut.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan Program Panji CorpU di BKD Kabupaten Kediri dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan untuk

kegiatan-kegiatan inti, seperti webinar, podcast, dan pelatihan. Peralatan teknis yang diperlukan untuk mendukung kegiatan seperti video konferensi, pelatihan daring, dan produksi materi telah disediakan dengan baik. Sebagai contoh, fasilitas seperti Balai Pengembangan Kompetensi di Kecamatan Tarokan dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat pelatihan dan workshop, memberikan kesan bahwa Kabupaten Kediri memiliki sarana pelatihan yang memadai untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN.

Namun, salah satu sarana dan prasarana yang dimiliki Panji CorpU mengalami kendala, yakni aplikasi Sibangkomar, dimana terdapat masalah teknis seperti kesulitan login, tampilan menu yang tidak muncul, dan aksesibilitas aplikasi yang belum optimal sering kali dikeluhkan pengguna. Kendala ini mengurangi efektivitas aplikasi sebagai sarana pendukung utama dalam mencapai tujuan Panji CorpU.

3. Disposisi

Dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik karya Leo Agustino, disposisi didefinisikan sebagai karakter atau sifat yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik yang memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Disposisi mencakup beberapa elemen penting seperti komitmen dan sikap demokratis. Sifat-sifat ini sangat krusial dalam memastikan bahwa kebijakan atau program yang dijalankan dapat meraih tujuan yang telah direncanakan (Agustino, 2016).

Dalam konteks pelaksanaan Program Panji CorpU di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, disposisi para pegawai menjadi elemen kunci dalam keberhasilan program. Sikap positif dan komitmen tinggi dari para pegawai dalam menjalankan tugas mereka akan mendorong efektivitas program. Agustino menekankan bahwa sikap pelaksana, pemahaman mereka terhadap kebijakan, dan responsivitas mereka terhadap kebutuhan masyarakat merupakan aspek penting dari disposisi yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

a. Sikap

Para pegawai dalam melaksanakan Program Panji CorpU mengedepankan sikap positif. Sikap positif mencerminkan pandangan dan perasaan pelaksana yang mendukung kebijakan, seperti kesediaan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bersifat jujur dan mengedepankan nilai-nilai demokratis. Dalam implementasi Program Panji CorpU oleh BKD Kabupaten Kediri, sikap positif dari para pegawai menjadi krusial.

Sebagai contoh, pada wawancara yang disampaikan oleh Ira Puspitasari, beliau menyampaikan bahwa para peserta Webinar diberikan kebebasan untuk menyuarakan kebutuhan, ide, dan gagasan terkait tema atau topik yang ingin diangkat dalam program ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana program tidak hanya menjadi pengarah kegiatan secara sepihak, tetapi juga bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dari para peserta maupun pegawai lain.

b. Komitmen

Implementasi Program Panji CorpU didukung oleh komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pimpinan, rekan kerja, dan tim lintas bidang. Dukungan ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan, sinergi antarbidang, serta inisiatif untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program. Hasil nyata dari komitmen ini adalah peningkatan signifikan dalam indeks profesionalitas ASN, yang mencerminkan keberhasilan program dalam mengembangkan kompetensi ASN.

Komitmen lainnya dari para pelaksana Panji CorpU di BKD Kabupaten Kediri diwujudkan melalui strategi dan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Bidang pengembangan kompetensi (Bangkom) bertanggung jawab atas 80% pelaksanaan program, didukung koordinasi dengan stakeholder selama perencanaan. Dukungan dari berbagai pihak, sinergi antarbidang, serta hasil yang signifikan dalam

peningkatan profesionalitas ASN menunjukkan bahwa komitmen BKD telah memenuhi prinsip-prinsip implementasi yang ideal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang menjalankan tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasinya. Dalam penerapan Program Panji CorpU di BKD Kabupaten Kediri, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi salah satu elemen kunci yang mendukung jalannya program secara terstruktur dan terorganisir. SOP ini mencakup panduan untuk berbagai aktivitas, seperti pelaksanaan *Massive Open Online Learning* (MOOL), pelatihan, webinar dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.

SOP dirancang agar prosedurnya sederhana dan inklusif. Misalnya, untuk mengikuti webinar, peserta hanya perlu mengisi formulir pendaftaran, mengikuti post-test, dan langsung mendapatkan sertifikat. Program ini juga dirancang untuk membuka akses kepada khalayak luas, termasuk peserta dari luar Pemkab Kediri, dengan memanfaatkan platform daring seperti YouTube. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah partisipasi tetapi juga mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi birokrasi terhadap kebutuhan ASN serta masyarakat. Adapun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Panjalu Jayati Corporate University (Panji CorpU) tertuang di dalam Keutusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/ 79 / 418.08/ 2022.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya artikel ini, di antaranya :

1. Ibu Indah Prabawati, S. Sos., M.Si selaku dosen pembimbing.
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si dan Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si selaku dosen penguji.
3. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Unesa.
4. Orang tua yang sudah memberi segala bentuk dukungan.
5. Teman-teman yang senantiasa memberi dukungan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Program Panjalu Jayati Corporate University di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan telah memenuhi unsur implementasi. Pelaksana dari program ini adalah Pegawai BKD Kabupaten Kediri, terutama dari bidang Pengembangan Kompetensi ASN. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalitas ASN.

Meskipun demikian, terdapat beberapa variabel yang belum terimplementasi dengan baik. Variabel Komunikasi kurang optimal, dimana peserta Panji CorpU mengalami kesulitan dalam membagi waktu karena program tersebut sering dilaksanakan bertepatan dengan jam kerja, sehingga peserta Panji CorpU kurang dapat memahami materi yang diberikan secara maksimal. Selanjutnya pemakaian aplikasi sibangkomar yang tidak dilakukan secara konsisten, hal ini terjadi karena aplikasi sedang *maintenance* sehingga tidak bisa diakses dan dihentikan sementara.

Variabel Sumber Daya mendapati beberapa kendala, diantaranya aplikasi Sibangkomar yang mengalami kesulitan untuk login, tampilan menu yang tidak muncul, dan aksesibilitas aplikasi yang belum optimal sering kali dikeluhkan pengguna. Hal ini disebabkan oleh pengembang aplikasi atau programmer sibangkomar sudah tidak mampu untuk melanjutkan pengembangan aplikasi dikarenakan masalah kesehatan, akibatnya proses pengembangan aplikasi dihentikan sementara. Serta kurangnya sumber daya manusia, hal ini dibuktikan dengan seringnya pegawai yang merangkap berbagai jobdesk.

Disposisi dalam program ini telah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan komitmen yang tinggi, tercermin dalam partisipasi aktif seluruh pihak dalam berbagai kegiatan yang diadakan Panji CorpU, koordinasi lintas bidang dan kolaborasi diantara tim pelaksana telah meningkatkan efisiensi dana efektivitas program, sikap demokratis yang dimiliki tim Panji CorpU yang dibuktikan dengan berbagai cara, misalnya kegiatan musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas kebutuhan program sebelum kegiatan dilaksanakan, kemudian memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan ide, kritik, atau saran, baik melalui survei kepuasan, post-test, maupun kolom khusus untuk saran yang mendukung terciptanya program yang responsif, relevan, dan berkelanjutan.

Struktur birokrasi Panji CorpU telah memiliki prosedur yang jelas, pelaksanaan kegiatan yang fleksibel, dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya mekanisme pelaksanaan program Panji CorpU di Kabupaten Kediri yang diatur dan ditetapkan dalam Standart Operational Procedure (SOP), yaitu Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/79/418.08/2022 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Panjalu Jayati Corporate University (PANJI CORPU). Selanjutnya, struktur birokrasi yang fleksibel dan mudah di akses dimana-mana juga telah tercipta yakni melalui webinar-webinar yang diadakan oleh Panji CorpU guna memunhi kewajiban 20 JP (Jam Pelajaran) ASN dalam satu tahun. Kemudian kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan sasaran, ditunjukkan dengan program Panji CorpU yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap OPD di Kabupaten Kediri.

Saran

Berdasarkan hasil uraian Implementasi Program Panjalu Jayati Corporate University di Kabupaten Kediri yang pada proses implementasinya menemui beberapa masalah yang harus diperbaiki. Berikutnya saran yang dapat diberikan peneliti untuk meningkatkan proses implementasi program tersebut ialah sebagai berikut :

1. Tim Panji CorpU perlu membuat aplikasi baru sibangkumar yang lebih terintegrasi, karena seperti yang dikeluhkan bahwa banyak aplikasi di BKD Kabupaten Kediri yang berdiri sendiri-sendiri atau terpisah, seperti aplikasi untuk cuti atau aplikasi untuk laporan kegiatan. Harapannya aplikasi baru sibangkumar dapat menampung semua komponen aplikasi yang ada di BKD Kabupaten Kediri menjadi satu.
2. Tim Panji CorpU perlu melakukan pemeriksaan aplikasi secara berkala untuk meminimalisir masalah dan eror pada aplikasi sibangkumar. Sehingga apabila ditemukan eror atau masalah bisa langsung ditindaklanjuti oleh tim Panji CorpU.
3. Tim Panji CorpU perlu memberi jadwal pelatihan yang terstruktur, sehingga ketika sedang melakukan pelatihan kepegawaian, peserta dapat lebih fokus terhadap materi yang disampaikan.
4. BKD perlu menambahkan pegawai ke dalam Team Panji CorpU untuk mendukung Program Panji CorpU, supaya pegawai bekerja sesuai jobdesknya masing-masing, sehingga Panji CorpU dapat berjalan secara konsisten dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- BKN. (2022). *BUKU SAKU DIGITAL (E-BOOK) INDEKS PROFESIONALITAS ASN*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.); 3rd ed.). SAGE.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik* (H. . Gedeona & M. Nurafandi (eds.); 3rd ed.). CV. Alfabeta.
- Sanjaya, Y. C. A., & Pratiwi, I. E. (2023). *9 Faktor yang Menyebabkan KIP Kuliah Dicabut, Mahasiswa Wajib Tahu*. Kompas.Com.

- https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/03/203000365/9-faktor-yang-menyebabkan-kip-kuliah-dicabut-mahasiswa-wajib-tahu?jxrecoid=14e25be8-813c-4f16-b148-b70dd3b2f7b0~kg_internal&source=widgetML&engine=C
- Setyawan, Z. D., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Program Berbasis Inovasi Pelayanan Kepegawaian Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (Sapk) (Studi Pada Aplikasi Layanan Pensiun Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur). *Publika*, 159–170. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p159-170>
- Solehudin. (2023). Membangun Budaya Kerja ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Melalui Implementasi Konsep GEULIS Building Civil Servants' Work Culture in the Local Government of Karawang Regency Through the Implementation of the GEULIS Concept. In *Jurnal Ilmiah Karawang* (Vol. 1, Issue 2). <https://jika.karawangkab.go.id>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D* (1st ed.). Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); 1st ed.). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tunsiyah, S., & Soantahon, S. M. (2021). Analisa Penerapan Corporate University di Instansi Pemerintah. *Jurnal Administrastrasi Pendidikan*, 55, 55–67. <https://doi.org/10.17509/jap.v28i3>
- Utami, D. A., Mahmudah, L. N., Sahilla, F. I., Amaretta, F. R., Aini, K., & Sari, D. C. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(2), 97–104.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.